

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, yang pertama yaitu tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dasar variabel yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Setelah itu peneliti akan membahas tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan tentang model variabel, lalu diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

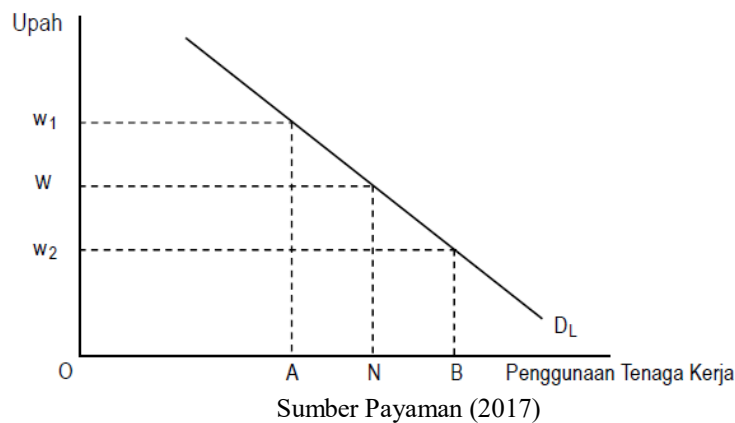
Sebelum konsep angkatan kerja dijelaskan perlu diketahui tentang definisi bekerja, bekerja adalah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuangan selama paling sedikit satu jam dalam satu minggu, waktu bekerja tersebut harus berurutan dan tidak terputus. Dalam UU No 13 tahun 2003 pasal 1 menjelaskan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang sedang bekerja, dan penduduk yang sedang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang tergolong bukan angkatan kerja antara lain penduduk yang melakukan kegiatan seperti bersekolah, mengurus rumah tangga, penduduk dan penduduk yang melakukan kegiatan lainnya seperti, menerima pendapatan, cacat jasmani, pensiunan (Payaman, 2017).

Angkatan kerja didefinisikan sebagai jumlah penduduk usia kerja yang memiliki dan belum memiliki pekerjaan, tetapi telah mampu dalam arti sehat fisik dan mental tidak kehilangan kebebasannya untuk memilih dan melakukan pekerjaan tanpa ada unsur paksaan. Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan, angkatan kerja merupakan penduduk yang telah mencapai usia kerja dengan kata lain apakah mereka bekerja atau tidak, dalam kondisi ingin bekerja, mereka mampu melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan golongan angkatan kerja, golongan bukan angkatan kerja yang juga termasuk kedalam bagian tenaga kerja. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas dua golongan yaitu:

1. Golongan yang sedang bersekolah yaitu mereka yang sedang berkegiatan hanya bersekolah.
2. Golongan yang mengurus rumah tangga yaitu mereka yang berkegiatan untuk mengurus rumah tangga.

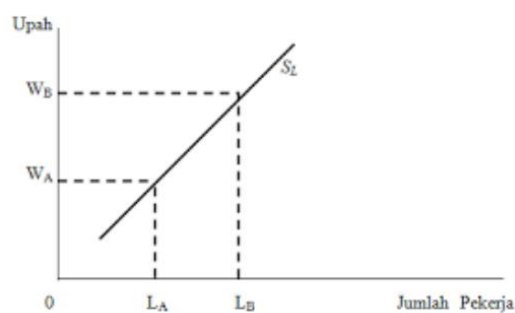
Dalam kegiatan produksi, permintaan perusahaan akan tenaga kerja pada dasarnya tergantung pada besarnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dimana permintaan tersebut di pengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja dinamakan pasar kerja. Besar jumlah orang yang bekerja atau tingkat employment dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut. Selanjutnya, besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah. Makin tinggi permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, makin tinggi pula permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja

dan besarnya permintaan terhadap barang dan jasa tersebut tergantung pada jumlah penduduk dan tingkat pendapatan.



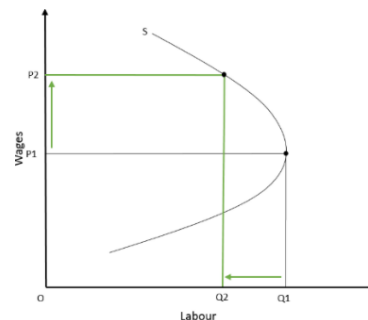
Gambar 2. 1 Kurva Permintaan

Secara makro penawaran tenaga kerja diartikan sebagai sumber penyediaan tenaga kerja secara nasional, regional, maupun dalam lingkup kabupaten sebagai satu unit agregasi. Sedangkan secara mikro, penawaran tenaga kerja menyangkut keputusan individu mengenai penggunaan waktu yang dimilikinya untuk bekerja dan yang digunakan sebagai waktu senggang (Kusnedi, 2015). Sumarsono dan Damayanti (2018) menyebutkan bahwa penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang untuk bekerja atau tidak. Keputusan ini tergantung pada tingkah laku seseorang dalam menggunakan waktunya, Hal tersebut menyebabkan bentuk dari kurva penawaran membelok kekiri yang dikenal dengan backward bending supply curve. Penawaran tenaga kerja dapat digambarkan dalam kurva berikut



(a)

Kurva Penawaran Tenaga Kerja



(b)

Kurva *Backward Bending Supply*

Sumber: Kusnedi (2015)

Gambar 2. 2 Kurva Penawaran Tenaga Kerja

Kurva penawaran menelusuri hubungan antara tingkat upah dan jam kerja. Dapat dilihat dalam gambar (a) bahwa ketika tingkat upah (W) naik dari W ke W_1 atau W_2 , maka seorang individu akan menambah waktu kerjanya dari TL menjadi TL_1 atau TL_2 . Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi tingkat upah semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Tetapi setelah mencapai titik tertentu, kurva penawaran akan berbalik ke belakang atau *backward bending supply curve* sebagaimana yang tampak dalam gambar (b) Kondisi tersebut menggambarkan naiknya tingkat upah tidak mengakibatkan jam kerja bertambah bahkan menjadi berkurang. Karena setelah mencapai pendapatan yang cukup tinggi, orang cenderung menghargai waktu luang dibandingkan bekerja. Kurva penawaran tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja agregat berasal dari penjumlahan penawaran individu (Kusnedi, 2015).

Menurut Rahardja (2016) Penawaran tenaga kerja adalah jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh individu (konsumen) pada berbagai tingkat upah (nominal) dalam upaya memaksimumkan utilitas hidupnya. Penawaran tenaga kerja merujuk

pada jumlah jam kerja yang masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan. Ketiga unsur kunci untuk penawaran tenaga kerja adalah jam kerja pekerja, partisipasi angkatan kerja, dan imigran (Samuelson, 2018).

Menurut Arida & Julaini, 2015 penawaran tenaga kerja ada dua macam yaitu penawaran jangka pendek dan penawaran jangka panjang. Penawaran jangka pendek adalah suatu perekonomian yang menawarkan kepada seluruh jumlah tenaga kerja yang mana hasil pilihan jam kerja dan pilihan partisipasi oleh individu dapat dilihat dari penawaran tenaga kerja bagi pasar. Sedangkan penawaran jangka panjang merupakan konsep penyesuaian terhadap perubahan-perubahan kendala yang mana penyesuaian tersebut berupa perubahan jumlah penduduk maupun partisipasi tenaga kerja.

Pasar tenaga kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk dari adanya interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam pasar persaingan sempurna, di mana tidak ada satupun produsen dan konsumen yang memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mengatur harga input maupun harga output, tingkat penyerapan tenaga kerja dan harga tingkat upah biasanya ditentukan secara bersamaan oleh seluruh harga output dan faktor produksi selain dari tenaga kerja. Pasar tenaga kerja memiliki fungsi untuk menyalurkan tenaga kerja dan menyediakan pendapatan atau upah karena tenaga kerja yang menawarkan jasanya, akan memperoleh pendapatan atau upah guna membiayai kebutuhan hidup. Sedangkan yang mempekerjakan tenaga kerja tersebut akan memperoleh keuntungan atau laba.

Menurut Nabila & Nugraha, (2025). menjelaskan bahwa peningkatan pembentukan modal tetap (*gross fixed capital formation*) memiliki hubungan positif terhadap peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Teori investasi dan pertumbuhan ketenagakerjaan menjelaskan bahwa peningkatan investasi, baik investasi domestik maupun asing, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja melalui ekspansi kapasitas produksi dan adopsi teknologi baru. Disisi fiskal, teori kebijakan fiskal keynesian menyatakan bahwa belanja pemerintah berperan sebagai stimulus permintaan agregat yang dapat mendorong pertumbuhan output dan penciptaan lapangan kerja. Belanja pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan layanan sosial berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan dan pengurangan beban domestik yang tidak dibayar (IMF, 2020).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Payaman, 2017).

2.1.1.1 Teori Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

teori penawaran tenaga kerja (*Labor Supply Theory*) menjelaskan bahwa keputusan individu untuk berpartisipasi dalam pasar kerja merupakan hasil dari

pilihan rasional antara bekerja dan tidak bekerja, yang dipengaruhi oleh tingkat upah (Borjas 2015). Partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja dapat dijelaskan melalui teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dan teori modal manusia (*human capital theory*). Teori pilihan rasional menjelaskan bahwa keputusan perempuan untuk bekerja dipengaruhi oleh pertimbangan biaya dan manfaat, seperti tingkat upah, waktu, dan tanggung jawab rumah tangga.

Adapun W. Arthur Lewis dalam Berutu et al., 2022) mengatakan, pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk di mana apabila penduduk mengalami penambahan jumlah maka akan berpengaruh pada bertambahnya angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas maka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan adalah, rasio antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika golongan tenaga lebih banyak masuk ke golongan angkatan kerja maka hal ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Sebaliknya jika tenaga kerja lebih banyak yang masuk ke golongan bukan angkatan kerja maka akan menurunkan jumlah angkatan kerja dan akan menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja.

ILO mendefinisikan TPAK atau *Labor Force Participation Rate* (LFPR) sebagai ukuran proporsi populasi usia kerja suatu negara yang bergerak aktif

dipasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Ini memberikan indikasi ukuran pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa, relatif terhadap populasi pada usia kerja. TPAK menghitung jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai presentase dari penduduk usia kerja (ILO).

2.1.1.2 Peran Perempuan Dalam Ketenagakerjaan

Fenomena wanita bekerja sudah dimulai dari era emansipasi perempuan yang diperjuangkan oleh RA Kartini hingga sekarang yang terdapat dari berbagai lapisan masyarakat yang dimulai dari masyarakat golongan bawah, menengah dan atas. Masyarakat golongan bawah bekerja untuk membantu ekonomi keluarga yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan wanita golongan atas bekerja karena alasan karir dengan pendidikan tinggi atau mengaktualisasikan diri mereka. Makin rendah lapisan ekonomi atau pendapatan, maka akan semakin tinggi alokasi waktu istri dan anak dalam nafkah (Mangkuprawira, 2015).

Partisipasi kaum perempuan dalam angkatan kerja di negara-negara dunia ketiga telah meningkat secara dramatis pada tahun 1990 dimana untuk negara-negara Asia meningkat sampai 4,3%. Tetapi kebanyakan kaum wanita tersebut hanya bekerja di tempat-tempat yang tidak banyak menghasilkan pendapatan, mereka terpusat di sektor pertanian sebanyak 80% atau sektor-sektor informal perkotaan 25 hingga 40%. Kaum wanita hampir selalu mengalami diskriminasi dalam pekerjaan (Todaro, 2016).

Jumlah angkatan kerja perempuan lebih rendah dari pada jumlah angkatan kerja laki-laki, dimana jumlah tenaga kerja perempuan yang masuk kedalam pasar kerja hanya sekitar separuh dari jumlah laki-laki. Tetapi jumlah perempuan yang

secara absolut lebih besar dari pada jumlah penduduk laki-laki, dengan jumlah wanita yang begitu besar maka mereka merupakan potensi yang harus diperdayakan untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Menurut perspektif gender perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki berakar pada ideologi gender. Ideologi gender ini bersumber dari konstruksi sosial masyarakat. Diyakini bahwa secara biologis perempuan dan laki-laki itu berbeda maka peran mereka juga harus berbeda. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan dalam pasar kerja antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja bukan bersumber pada masalah perempuan tetapi bersumber dari luar diri mereka yaitu pandangan masyarakat bahwa kualitas sumber daya perempuan kurang berkualitas dibandingkan dengan laki-laki sehingga meletakkan perempuan sebagai alat produksi yang dapat dimanfaatkan dan dapat dibayar murah dalam proses pembangunan (Murniati & Nunuk A, 2017).

Perubahan di bidang sosial ekonomi yang dialami oleh Indonesia ini telah menentukan persamaan gender dalam masyarakat dimana peranan dan kedudukan wanita dalam masyarakat agar dapat di samakan dalam status sosialnya dimana wanita sebagai mitra yang sejajar dengan pria yang mandiri dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan adanya persamaan hak dan kewajiban, perempuan bersama pria mempunyai kesetaraan hak dan tanggung jawab yang sama atas kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Untuk mewujudkan hal tersebut maka di perlukan kerja keras di sertai dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja wanita sehingga dapat bersaing di segala sektor tanpa memperhatikan perbedaan kodrat perempuan. Perubahan dalam struktur ekonomi

yang terjadi dalam proses pembangunan biasanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Seorang perempuan yang karena penghasilan orang tuanya atau suaminya tidak mencukupi terpaksa turut bekerja. Partisipasi perempuan bekerja adalah ikut sertanya kaum wanita untuk bekerja di luar rumah. Sebagai tenaga kerja, dalam berprofesi atau berwiraswasta dan sebagainya, untuk mengusahakan atau menambah penghasilan bagi keluarga, dan bagi wanita yang terpelajar untuk menjalankan karir masing-masing (Sri Lestari, 2018).

Keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan ekonomi semakin meningkat ditandai oleh dua proses. Pertama, peningkatan dalam jumlah perempuan yang terlibat dalam pekerjaan diluar rumah tangga, yang dapat dilihat dari kenaikan TPAK perempuan dari waktu ke waktu. Kedua, peningkatan dalam jumlah bidang pekerjaan yang dapat dimasuki oleh perempuan, dimana bidang yang sebelumnya masih didominasi oleh laki-laki berangsur-angsur memasuki atau bahkan mulai didominasi oleh perempuan. Kedua bentuk perkembangan tersebut menandakan perkembangan kuantitatif penting dalam kehidupan perempuan, karena bukan hanya menunjukkan kesempatan yang semakin terbuka bagi perempuan, tetapi juga pentingnya analisis tentang makna perkembangan tersebut bagi laki-laki dan perempuan di masyarakat secara umum. Tenaga kerja perempuan banyak yang dipekerjakan di tempat-tempat yang *stereotype* gender yaitu yang memerlukan ketelitian dan padat karya (Sonny, 2019).

2.1.2 Upah Minimum

Pengertian upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Untuk di Indonesia, kebijakan penetapan upah minimum regional (UMR) beserta peningkatannya setiap periode merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja, di arahkan agar penentuan besarnya mengacu kepada terpenuhinya kebutuhan hidup minimum. Ini sesuai dengan standar internasional bahwa upah minimum yang di tetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum. Upah dalam teori ekonomi, yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh para pengusaha kepada tenaga kerja (Sukirno, 2016).

Upah adalah hak pekerja yang diterimanya yang dinyatakan dalam bentuk uang kepada pekerja dari pemberi kerja dalam hal balas jasa yang dibayarkan sesuai perjanjian kerja. Menurut Sumarsono (2015) upah yaitu sumber penghasilan utama bagi pekerja sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sementara bagi perusahaan, upah yaitu satu diantara komponen biaya produksi yang dianggap dapat mengurangi tingkat keuntungan yang dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk menjaga upah seminimal mungkin, sehingga keuntungan perusahaan dapat meningkat (Purba et, al., 2020).

Definisi upah pada UU No 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang diterapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Jenis-jenis upah dalam berbagai keputustakaan hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2. Upah Nyata (Riil Wages)

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan tergantung dari:

- a. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
- b. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

3. Upah Hidup

Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.

4. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum adalah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha dan perusahaan industry untuk memberikan upah pekerja di bidang bisnis dan pekerja (Widyaningrum & Bintariningtyas, 2021). Berdasarkan keputusan Menteri No. 1, 1999 Pasal 1 ayat 1, tentang upah minimum adalah upah bulanan paling rendah dimana tersusun atas upah pokok tidak terkecuali dengan tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap yaitu sejumlah upah yang dibayarkan kepada pegawai secara tetap, tidak tergantung pada kehadiran atau prestasi tertentu. Tujuan penetapan upah minimum adalah agar pekerja dapat memperoleh penghasilan yang layak (Nur Wulansari et, al., 2021). Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah (cq. Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota), dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum, yaitu :

- a. untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja;
- b. untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan;
- c. untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan;

- d. untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan;
- e. mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999 menyatakan bahwa ada sepuluh prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam penetapan kebijakan upah minimum di Indonesia.

- 1) Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
- 2) Upah minimum wajib dibayar kepada bekerja secara bulanan atau dengan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha misalnya untuk upah mingguan atau upah dua mingguan.
- 3) Besarnya upah pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap, atau dalam masa percobaan adalah serendah-rendahnya sebesar upah minimum.
- 4) Upah minimum hanya berlaku untuk pekerja yang bekerja dibawah satu tahun.
- 5) Peninjauan upah dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha.
- 6) Pekerja dengan sistem borongan atau dengan satuan hasil serendah rendahnya adalah sebesar upah minimum untuk upah bulanannya.
- 7) Upah pekerja harian lepas ditetapkan secara bulanan berdasar hari kehadiran (dengan pro rata basis)

- 8) Perusahaan yang telah memberikan upah diatas upah minimum tidak diperbolehkan menurunkan upah.
- 9) Dengan kenaikan upah minimum, pekerja diwajibkan untuk memelihara prestasi kerja (produktivitas) yang ukurannya dirumuskan bersama antara pekerja dan pengusaha.
- 10) Pengusaha yang tidak mampu menerapkan kebijakan upah minimum untuk pekerja diijinkan untuk melakukan penangguhan sementara kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (Rosandi, et. al., 2017).

2.1.2.1 Teori Upah

Teori upah efisiensi (*efficiency wage theory*) mengaskan bahwa upah yang lebih tinggi dari tingkat pasar dapat meningkatkan produktivitas dan retensi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan, sehingga mendorong peningkatan permintaan dan partisipasi tenaga kerja (Akerlof & Yellen, 2020).

Teori neoklasik beranggapan bahwa upah cukup mudah di pasar tenaga kerja, sehingga penawaran dan permintaan tenaga kerja selalu seimbang dan pengangguran tidak terjadi. Teori neoklasik juga menyatakan bahwa karyawan menerima upah yang sepadan dengan peningkatan keuntungan marjinal mereka. Upah disini merupakan penghargaan atas kerja keras yang diberikan oleh pelaku usaha. Upah dibayar oleh pelaku usaha sesuai dengan produktivitas yang diberikan oleh angkatan kerja, yang berarti bahwa dalam teori ini dapat dilihat bahwa teori

neoklasik didasarkan pada prinsip nilai tambah faktor produksi, upah adalah pembayaran yang diterima oleh pelaku usaha dari karyawan untuk menambah nilai pada produksi (Ansori, 2015).

2.1.3 Investasi

Dalam menjalankan roda perekonomian negara diperlukan adanya aliran modal atau investasi untuk menunjang proses pembangunan ekonomi. Investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian. Investasi dapat bersumber dari dalam dan luar negeri. Salah satu pendanaan luar negeri yang menunjang pembangunan nasional adalah Penanaman Modal Asing (PMA) atau investasi asing. Dalam literatur empiris, investasi sering dikaitkan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di banyak konteks negara berkembang seperti Indonesia. Peningkatan investasi mendorong penciptaan lapangan kerja pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan jika kondisi pasar tenaga kerja mendukung kesetaraan gender dan keterampilan tenaga kerja perempuan yang sesuai dengan kebutuhan sektor investasi (Mawadda et, al., 2025).

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian (Sukirno, 2016).

Menurut Samuelson (2017), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang- barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang. Terdapat fungsi penting kegiatan investasi dalam perekonomian:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertambahan produksi nasional serta kesempatan kerja.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi, perkembangan ini akan memberi sumbangan penting terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat (Sasana, 2018)

2.1.3.1 Macam-macam Investasi

Menurut Suryanto (2015) penanaman modal asing adalah aliran modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung maupun investasi tidak langsung.

- a. Investasi langsung merupakan dana investasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku, dsb (Todaro, 2016). Penanaman modal asing terdiri dari aset-aset nyata yaitu pembelian tanah yang digunakan

sebagai sarana produksi, pembangunan pabrik, pembelanjaan peralatan inventaris didampingi dengan fungsi-fungsi manajemen yang ada (Ningrum & Indrajaya, 2018). Investasi ini mempunyai efek penggandaan tinggi karena bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya PMA, transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal juga terjadi, yang memperkuat daya saing ekonomi domestik dalam jangka panjang.

- b. Investasi tidak langsung atau investasi portofolio yaitu investasi yang dilakukan dengan pembelian surat berharga (saham) dan obligasi di pasar modal. Investasi portofolio tidak bisa diharapkan stabilitasnya karena investor mempunyai mobilitas modal yang tinggi, tergantung kondisi pasar modal negara bersangkutan. Investasi portofolio juga belum tentu dapat meningkatkan lapangan pekerjaan baru (Anorga, P., & Pakarti, 2016).

Pada dasarnya, investasi (penanaman modal) secara langsung ini jauh lebih kompleks dari sekedar transfer modal ataupun pendirian bangunan pabrik dari suatu perusahaan asing di wilayah suatu negara berkembang. Perusahaan-perusahaan raksasa tersebut juga membawa teknik atau teknologi produksi yang lebih canggih, selera dan gaya hidup, jasa-jasa manajerial, serta berbagai praktek bisnis termasuk pemberlakuan dan pengaturan perjanjian kerjasama dan sebagainya (Malik & Kurnia, 2018).

Investasi langsung berarti perusahaan dari negara penanaman modal secara *de facto dan de jure* melakukan pengawasan atas aset (aktiva) yang ditanam di negara penyimpanan modal dengan cara investasi. Investasi langsung investor

mengendalikan manajemen, biasanya dilakukan oleh perusahaan transnasional dan periode waktunya panjang karena menyangkut barang-barang. Modal investasi langsung lebih tertarik pada besar dan tingkat pertumbuhan pasar, tenaga kerja dan biaya produksi serta infrastruktur. Sedangkan pada investasi portofolio, investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen.

2.1.3.2 Teori Investasi

Teori investasi dan penciptaan lapangan kerja menyatakan bahwa dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal melalui investasi baik domestik maupun asing meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan peluang pekerjaan baru. Peningkatan investasi memperluas struktur sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan, terutama di sektor manufaktur dan jasa yang cenderung padat karya (Todar & Smith, 2020).

Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata pertenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo klasik, Solow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2020).

2.1.4 Belanja Pemerintah

Belanja negara merupakan salah satu komponen dalam APBN. Pengertian belanja negara menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, yakni

belanja negara merupakan kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa belanja negara dianggarkan oleh pemerintah untuk setiap tahunnya dan diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dalam APBN dirinci berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja (ekonomi). Berdasarkan organisasi, belanja negara dibuat dengan menyesuaikan susunan K/L pemerintah pusat. Berdasarkan fungsi, belanja negara dirinci apakah termasuk belanja fasilitas umum, pendidikan, pelayanan umum, kesehatan, pariwisata, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, ekonomi, perlindungan sosial, keamanan dan ketertiban, atau perumahan. Yang terakhir, berdasarkan jenis belanja (ekonomi), belanja negara dirinci apakah termasuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Pengeluaran pemerintah biasanya juga disebut belanja pemerintah, dan dalam ruang lingkup daerah, maka disebut belanja pemerintah daerah. Menurut PIP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang eksekusi yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Arsita, 2019).

Kerangka konsep perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan dengan $Y = C + I + G + (X - M)$. Dimana

variabel Y merupakan pendapatan nasional dan menggambarkan sebagai penawaran agregat. Sedangkan variabel lainnya disebut sebagai permintaan agregat. Sebagai rumah tangga, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang banyak untuk membiayai kegiatannya, bertujuan guna menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dan untuk membiayai proses kegiatan perekonomian suatu negara (Rahmawati, 2018).

Belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, belanja pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu kewajiban. Tujuan dari teori mikro mengenai mempengaruhi tersedianya barang publik. perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.

Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus dialokasikan secara efektif untuk belanja daerah yang bersifat produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan agar dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan (Samsiah, 2016).

2.1.4.1 Jenis-jenis Belanja Negara

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga. Beberapa diantara belanja tidak langsung:

- a) Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b) Belanja bunga adalah pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- c) Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- d) Belanja hibah adalah belanja yang diperlukan untuk menganggarkan pemberian uang barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
- e) Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- f) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri dari:
 - 1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi,
 - 2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota,
 - 3. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa,
 - 4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota,
 - 5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang daerah dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Diantaranya:

- a) Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c) Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.1.4.2 Teori Belanja pemerintah

Dalam teori kebijakan fiskal Keynesian, yang menekankan peran pengeluaran publik dalam mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Keynesian berargumentasi bahwa peningkatan belanja pemerintah pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan

pemberdayaan ekonomi dapat menciptakan permintaan efektif yang lebih tinggi sehingga mendorong aktivitas produksi dan penciptaan lapangan kerja (IMF, 2020).

Dalam ekonomi Keynesian, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat (aggregate demand) dalam ekonomi, yang pada saatnya mendorong peningkatan produksi dan pekerjaan. Dalam kondisi pengangguran tinggi (seperti resesi), pengeluaran pemerintah yang menciptakan efek multiplier dari setiap unit pengeluaran pemerintah menghasilkan peningkatan output dan pekerjaan yang lebih besar. Ini dapat mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja karena lebih banyak orang yang berpartisipasi untuk bergabung dalam pasar kerja akibat peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan. Dimana teori Keynes merumuskan pendapatan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dimana Y = Pendapatan

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Setiap penelitian memiliki dasar dan landasan yang akan dijadikan referensi dan acuan, baik itu berupa teori maupun hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inovasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan penelitian

serta untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi sebagai rujukan, tetapi juga sebagai pijakan konseptual untuk memperkuat argumentasi penelitian yang sedang dilakukan.

Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian yang mempunyai berkaitan atau relasi dengan penelitian ini, antara lain disajikan dalam tabel seagai berikut:

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Safitri & Iryani (2023) dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi dan Kemiskinan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Barat”	• Partisipasi Angkatan Kerja • Upah Minimum	• Kemiskinan • Pertumbuhan Ekonomi	PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan UMP berpengaruh positif dan signifikan sedangkan kemiskinan perpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan Kerja	Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol. 1 No 1 (2023)
2	Herman (2023) dengan Judul “Pengaruh UMR dan Inflasi	• TPAK • Upah Minimum	• Jumlah penduduk • Inflasi • Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk, produk domestik bruto daerah, dan inflasi mempengaruhi tingkat partisipasi	Relasi Jurnal Ekonomi Vol 15 No 15 (2023) ISSN: 2502-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekanbaru”		• PDRB	angkatan kerja sedangkan UMR tidak mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja.	9525 P-ISSN: 0216-2431
3	Rahamawati (dkk) (2025) dengan judul ”Pengaruh PDRB, UMP dan Inflasi Daerah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sepuluh Sumatera dalam Perspektif Ekonomi Islam”	• TPAK • Upah Minimum	• Inflasi • PDRB	UMP berpengaruh signifikan, inflasi daerah tidak berpengaruh signifikan dan PDRB tidak berpengaruh terhadap TPAK pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera	Jurnal Media Akademik (JMA) VOL.3 NO. 5 (2025) E- ISSN : 3031-5220
4	Jamila & Murianti (2025) dengan judul ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kab Mandailing Natal	• Upah Minimum • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	• Pendidikan • Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi berkorelasi negatif dan tidak signifikan, rata-rata lama sekolah berkorelasi positif dan signifikan, upah minimum kabupaten berkorelasi negatif dengan TPAK dan dan tidak signifikan	Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025 ISSN : 2614- 3097
5	Putra & Murianti	• Investasi • TPAK	• Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi tidak, mempengaruhi	Jurnal Pendidikan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2025) dengan judul “Analisis Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Upah Minimum terhadap tingkat partisipasi Angkatan kerja di Provinsi Riau			secara signifikan, investasi menunjukkan hasil yang tidak signifikan, upah minimum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja	Tambusai Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025 ISSN : 2614-3097
6	Ardela (dkk) (2019) dengan judul ”Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Pulau Jawa tahun 2006-2019”	• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja • Upah Minimum	• Tingkat Pendidikan • Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Pulau Jawa, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap partisipasi angkatan kerja wanita di Pulau Jawa dan UMP berpengaruh secara negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Pulau Jawa	Jurnal Ekuilibrium Vol. 3 No. 2 (2019): JEK Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019
7	Sajati & Pujianti (2025) dengan judul ”Determinan Tingkat Partisipasi Angkatan	• Upah Minimum • TPAK	• Indeks Pemberdayaan Gender • Rata-rata Lama Sekolah Perempuan	Pemberdayaan gender (IDG) dan UMP berpengaruh positif dan tidak signifikan, rata-rata Perempuan berpengaruh negatif	Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol 6 No 4 (2025) 1422-1444 P-ISSN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kerja Perempuan di Provinsi Jawa Barat”		• Angka Harapan Hidup	dan signifikan, dan angka harapan hidup perempuan berpengaruh positif	2620-295 E-ISSN 2747-0490
8	Ahmaddien & Sa’ dia (2020) dengan judul ”Pengaruh Kebijakan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia”	• Upah Minimum • Investasi	• Lapangan Kerja • Jumlah Pekerja Perempuan • PDB	UMP, Investasi, Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan pekerja perempuan di Indonesia	Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 1 No. 1, April 2020
9	Murialti (dkk) (2022) dengan judul “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Rokan Hilir (2010-2021)”	• Upah Minimum • TPAK Perempuan	• Perempuan dengan tingkat pendidikan SLTA • Perempuan dengan tingkat Pendidikan diploma • Jumlah penduduk perempuan • Pertumbuhan Ekonomi	PDRB, UMK, perempuan dengan Tingkat Pendidikan SLTA sederajat, perempuan dengan tingkat Pendidikan Diploma ke atas secara parsial berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap TPAK Perempuan, sedangkan variabel jumlah penduduk perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan	Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Vol. 12 No. 2, Desember 2022
10	Wahyuni & Anis (2019) dengan judul “Pengaruh Investasi Luar Negeri, Pendidikan	• TPAK • Investasi	• Pendidikan • TIK	Investasi Luar Negeri, Pendidikan, dan teknologi informasi komunikasi memiliki pengaruh signifikan antara	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 1, No. 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan TIK terhadap TPAK di Indonesia”			variabelnya dan secara bersama-sama juga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia	Agustus 2019, Hal 897-906
11	Sarri & Sugiharti (2022) dengan Judul “Analisis Faktor-faktor Yang mempengaruhi TPAK di Indonesia Tahun 2001-2020”	• TPAK • Upah Minimum	• UMKM • Konsumsi Rumah Tangga	pertumbuhan jumlah UMKM, konsumsi rumah tangga, dan upah minimum mempunyai pengaruh signifikan terhadap TPAK dalam jangka panjang baik secara simultan (bersama-sama) maupun secara parsial (antar satu variabel) di Indonesia tahun 2001-2020.	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol 5 No. 2 No.2, 2022, hal 603-616 ISSN 2746-3249
12	Lusiyanti & Wicaksono (2020) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Pendidikan dan faktor dan faktor sosial Demografi pada TPA Perempuan di Indonesia”	• TPAK	• Tingkat Pendidikan • Tempat Tinggal • Status Perkawinan • Keberadaan Balita	Pendidikan dan faktor sosial demografi secara serentak berpengaruh signifikan pada probabilitas Perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja	Jurnal Kajian Gender Nomor 12, tahun 2020
13	Saputra (dkk) (2019) dengan judul “Analisis	• TPAK • Upah Minimum	• Indeks Harga Konsumen	Indeks harga konsumen berpengaruh negatif	e-Jurnal Ekonomi Sumber daya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi TPAK di Provinsi Jambi”		• Pertumbuhan Ekonomi	dan tidak signifikan upah minimum provinsi dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK di Provinsi Jambi	dan Lingkungan Vol. 8 No. 2, Mei – Agustus 2019 ISSN 2303-1220
14	Aini (dkk) (2022) dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi TPAK di Kab atau Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020”	• TPAK • Upah Minimum	• Pertumbuhan penduduk • Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Upah berpengaruh positif dan signifikan, pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap partisipasi Angkatan kerja di kota/kab Provinsi Nusa Tenggara Barat	EKONOBIS ISSN: 1412-7601 Volume 9, No. 2 7601 Volume 9, No. 2 September 2022
15	Penelitian dari Tasmilah (2021) dengan judul “Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	• Belanja Pemerintah	• Tenaga Kerja Formal • Pertumbuhan Ekonomi	Belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja formal di Indonesia	Journal of Regional Economics Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2021: 92-112

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Upah Minimum dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Secara teoritis, kebijakan upah minimum merupakan salah satu instrumen penting dalam teori penawaran tenaga kerja, yang menyatakan bahwa keputusan seseorang untuk memasuki pasar kerja dipengaruhi oleh besaran insentif ekonomi yang tersedia (Borjas, 2015). Upah sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, dan memiliki arah hubungan yang positif dimana jika semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan dalam pasar tenaga kerja maka semakin banyak jumlah penduduk usia kerja yang memilih masuk ke pasar tenaga kerja, maka dengan otomatis akan meningkatkan jumlah angkatan kerja dan menurunkan jumlah bukan angkatan kerja, dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja maka akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan dalam masyarakat, maka semakin banyak anggota keluarga yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja (Gianie, 2023).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Aini (2022), Iskandar & Sa'dia (2020) yang menunjukkan bahwa tingkat upah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat maka semakin banyak anggota keluarga yang tertarik untuk bekerja di sektor industri atau dengan kata lain TPAK perempuan meningkat.

2.2.2 Hubungan Investasi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Kegiatan investasi tak hanya menimbulkan permintaan tetapi dapat juga memperluas hasil produksi. Istilah dari tenaga kerja adalah *marginal efficiency of capital* (MEC) dimana artinya dalam berinvestasi tingkat bunga bukanlah menjadi faktor utama yang mungkin meningkatkan dan menurunkan keuntungan, tetapi ada faktor lainnya yaitu seperti tenaga kerja. Dalam teori pembangunan ekonomi modern, investasi menjadi pendorong utama pembentukan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam teori Keynes, ditemukan korelasi positif pada investasi dan peluang kerja. Lebih banyak investasi berarti lebih banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Keynes menyatakan investasi mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja (Mita et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) menyatakan bahwa investasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Jiuhardi & Rahayu (2025). Peran investasi baik dalam bentuk asing maupun dalam negeri sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi terutama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.2.3 Hubungan Belanja Pemerintah dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

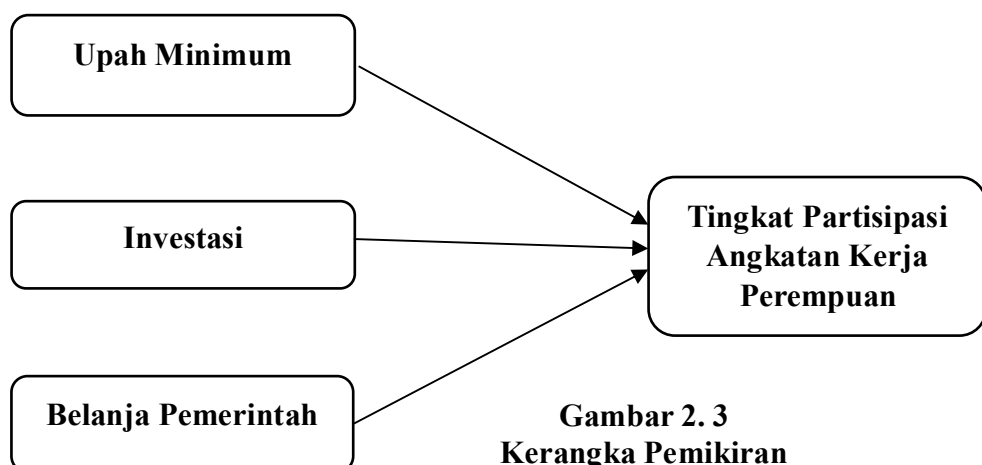
Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya TPAK Perempuan adalah kegiatan ekonomi. Dimana belanja pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, dengan tujuan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Program pembangunan menuntut keterlibatan banyak

orang dan membutuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut yang dinyatakan dalam peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (Tempone et al., 2020).

Secara teoritis, belanja pemerintah memiliki hubungan positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Peningkatan belanja pemerintah, khususnya pada sektor-sektor produktif dan sosial, berpotensi memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia perempuan, serta mengurangi hambatan struktural yang selama ini membetasi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja (Klasen et al., 2015).

Berdasarkan hasil penelitian dari Anugrawati & Iwang (2023), menyatakan bahwa belanja pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia. Belanja pemerintah akan menjadi sumber penerimaan masyarakat, sehingga mendorong permintaan agregat dan mampu membuka serta menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dijelaskan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (Sugiyono, 2019:99).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial dalam jangka panjang maupun jangka pendek upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tahun 2000-2024.
2. Diduga secara bersama-sama upah minimum, investasi, dan belanja pemerintah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia tahun 2000-2024.